

## **BAB III**

### **PEMIKIRAN POLITIK KH. IDHAM CHALID**

#### **A. Biografi KH. Idham Chalid**

Idham dilahirkan di Satui, (dekat wilayah Kota Baru, di bagian tenggara Kalimantan) Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922.<sup>1</sup> Ayahnya orang Amuntai dan ibunya orang Setui, dan inilah yang menjadi alasan mengapa Idham lahir di Setui. Ayahnya bernama H. Muhammad Chalid, seorang penghulu (pemuka agama yang berwenang untuk mengawinkan orang). Ia memiliki empat saudara kandung dalam keluarga, dua laki-laki dan dua adik perempuan.

Ketika berumur sekitar 6 tahun, Idham dan keluarganya pindah ke kampung halaman ayahnya, Amuntai- Hulu Sungai Utara (kurang lebih 200 KM dari Banjarmasin). Di Amuntai, keluarga ini tinggal di daerah Tangga Ulin dimana sanak familinya telah tinggal secara turun-temurun. Menurut cerita, kepindahan ini didahului oleh suatu kejadian dimana Idham dan orang tuanya diserang oleh sekelompok orang. Walaupun mereka selamat, kejadian itu menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak nyaman, sehingga orang tua Idham memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut.

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhajir, Idham Chalid, 19. Terdapat perbedaan tentang tanggal lahir KH. Idham Chalid. Arief Mudatsir Mandan dalam Napak Tilas serta Ahmad Muhajir berpendapat bahwa KH. Idham Chalid lahir ada tanggal tersebut. Berbeda dengan yang dimuat Tempo, KH. Idham Chalid disebutkan lahir 5 Januari 1921. Lih. Tim Penulis Tempo, Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indoneasia 1981-1982, (Jakarta: Graffiti, 1981), 99. Pendapat Tempo ini juga sama dengan catatan Mohammad Subhan dalam Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, (Surabaya: Khalista, 2007), pada halaman 227.

Di Amuntai Idham menghabiskan masa kecilnya. Ia adalah seorang anak yang cerdas dan berbakat. Idham langsung ditempatkan di kelas II ketika mendaftar masuk ke Sekolah Rakyat (SR) Amuntai. Selain itu, kemampuannya berpidato sudah mulai kelihatan sejak Idham bersekolah di SR. Teman akrabnya sejak kecil, H. Napiah, bercerita bahwa dengan penuh percaya diri Idham berpidato di depan teman-teman sekolahnya pada 31 Agustus 1934. Berarti usia Idham saat itu baru sekitar 12 tahun. Pidato buatan gurunya tersebut disampaikan dengan lantang tanpa teks. Hari itu merupakan hari yang tak terlupakan, dan sejak itulah Idham semakin sering berpidato di depan khalayak ramai dan berproses menjadi seorang pembicara yang ulung. Kelak kemampuan berpidatonya diakui secara luas baik di Amuntai maupun di kancah Nasional, baik sebagai penceramah, juru kampanye ataupun pengajar. Dan tak tanggung-tanggung, da'i *kondang* selevel Zainuddin MZ dan Syukron Makmun pun pernah berguru padanya. Kemampuannya ini pula - yang dikombinasikan dengan kecerdasan dan kerendahan hati, yang menjadi modal bagi perjalanannya di dunia politik. Pada tahun 1935, ia menamatkan pendidikan dasarnya.

Idham kemudian melanjutkan pendidikannya di *Madrasah al Rasyidiyyah* (dulunya bernama *Arabisch School*), sebuah lembaga pendidikan agama Islam. Didirikan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid pada tahun 1922. Beliau merupakan lulusan universitas Al-Azhar yang saat itu terkenal sebagai pusat studi agama Islam. Lembaga ini awalnya hanya pengajian yang dilangsungkan di rumah dengan sistim *halaqah* (para santri duduk di sekeliling guru sambil mengikuti pelajaran). Bertambahnya jumlah santri

menyebabkan tempat pengajian dipindah ke surau (mushalla). Tetapi, yang cukup menarik dan terbilang maju saat itu adalah penggunaan perlengkapan belajar seperti meja, kursi dan papan tulis. Meningkatnya animo masyarakat membuat sang guru membangun gedung dan dinamainya Arabische School (sekolah Arab).

Ayah H. Abdurrasyid adalah ulama pelopor pendirian perguruan agama. Beliau tidak hanya mendirikan sekolah di Amuntai, tetapi di berbagai wilayah di Hulu Sungai. Murid-murid beliau yang terkemuka juga diberi tugas membuka sekolah-sekolah agama jika telah kembali ke daerah mereka. Ia yang lulusan Al Azhar merekrut ulama-ulama setempat yang sebagiannya adalah lulusan Mekkah dan memberikan keleluasaan bagi pengembangan sekolah. Bila telah ada generasi muda yang siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan, beliau akan menyerahkannya dan pergi ke daerah lain untuk mendirikan perguruan agama yang lain.

Pada 22 Agustus 1931 kepemimpinan sekolah ini diserahkan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid kepada H. Juhri Sulaiman, karena beliau akan pergi ke Kandangan (HSS) untuk mendirikan perguruan Islam di sana. Pada saat itulah sekolah ini diganti namanya menjadi Madrasatur Rasyidiyyah dengan pengertian bahwa perguruan Islam ini adalah warisan sekaligus cita-cita Tuan Guru Abdurrasyid yang harus terus diperjuangkan.

Kesinambungan dan perubahan (dan juga pengembangan) menjadi ciri khas sekolah ini. Beberapa kali terjadi perubahan sistim pendidikan seiring dengan

bergantinya pucuk pimpinan. Direkrutnya para pengajar dari Pondok Modern Gontor adalah salah perkembangan yang terjadi saat Idham bersekolah di sana. Tokoh dari Gontor yang berpengaruh bagi sekolah ini di masa-masa awal pengembangannya adalah ustadz Arif Lubis. Pengajar dari gontor inilah yang kemudian memberikan warna “modern” bagi sekolah ini. Pengetahuan umum dimasukkan, organisasi didirikan, bahasa Arab dan Inggris dipraktekkan. Hal ini memberi pengaruh yang positif bagi Idham. Bahasa yang dikenalnya bertambah, yakni bahasa Arab dan Inggris, dan merupakan pengalaman pertama pada organisasi. Para pengajarnya pula yang membuat Gontor menjadi tujuan para murid setamatnya dari sekolah tersebut.

Semenjak tamat tahun 1938, Idham semakin sering diundang untuk berceramah di berbagai acara dan pertemuan. Hal ini membuat nama dikenal luas dan pergaulannya tidak terbatas pada teman-temannya saja, melainkan pemuka-pemuka agama yang sudah terkenal di daerah itu. Tetapi, pihak keluarganya menginginkan dirinya melanjutkan pendidikannya. Idham adalah anak yang cerdas dan berbakat, sehingga sayang kalau pendidikannya tidak dilanjutkan. Kira-kira demikianlah kesimpulan keluarganya dalam mengamati perkembangan tokoh kita ini.

Tahun 1938, Idham dikirim bersama beberapa orang temannya melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern (PM) Gontor Ponorogo dalam “missi studi” almaternya. Selama lima tahun menimba ilmu di sana Idham menyelesaikan pendidikannya di sana. Tiga tahun di *Kulliyah al Mu'allimin al Islamiyah* (pendidikan

guru agama Islam) dan sisanya di tingkat *Kweekschool Islam Bovenbouw*. Hal ini kembali menunjukkan kecerdasannya karena lazimnya hingga tingkat tersebut seorang santri harus menghabiskan waktu 7 hingga 8 tahun. Tahun 1943 Idham meneruskan pendidikannya ke Jakarta dan setahun kemudian menjadi guru di Gontor, sekaligus menjabat wakil direktur di sana.

Di Gontor kesadaran berorganisasi Idham semakin meningkat dan menemukan salurannya dengan aktif di gerakan kependuan. Dalam hal kemampuan berbahasa, selain penguasaan bahasa Arab dan Inggris yang semakin meningkat, di Gontor ia mendapatkan kemampuan berbahasa Jepang. Ia bahkan menjadi pengajar bahasa ini. Pihak Jepang yang sangat senang ada anak muda pribumi yang menguasai “bahasa ibu” mereka bahkan sempat mengundangnya untuk berkunjung ke negeri Matahari Terbit tersebut. Dan sebagaimana lazimnya tokoh yang lahir di masa-masa pemerintahan kolonial, Idham juga bisa berbahasa Belanda.

KH. Idham Chalid adalah seorang tokoh Nasional yang pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada lembaga legislatif, pada tahun 1950 beliau menjadi anggota DPR RIS selaku wakil daerah Banjar, sebagai anggota DPR wakil daerah Jawa Barat, menjadi anggota MPRS tahun 1959-1969, ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1971-1977, ketua MPR RI tahun 1971-1977.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h.434

Pada lembaga eksekutif beliau menjadi wakil perdana menteri II pada kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956-1957. Wakil perdana menteri II kabinet Djuanda atau Kabinet Karya tahun 1957-1959, menteri negara bidang kesra kabinet pembangunan I tahun 1968-1973, Menteri Sosial kabinet Pembangunan I tahun 1968-1973.<sup>3</sup>

Pada lembaga Yudikatif, KH. Idham Chalid pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI periode tahun 1978-1983.

Kemudian pada tahun 1952 menjadi Sekjen Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, dan pada tahun 1956-1984 menjabat sebagai Ketua Umum Tanfizhiah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama.<sup>4</sup>

Laksana air, KH Idham Chalid peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, Kairo, ini seorang tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis. Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasah Pondok Modern Gontor ini tidak kuatir mendapat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 435

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 435

kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian, bunglon bahkan avonturir.

Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodir itu kadang kala membuat banyak orang salah memahami dan mendepksripsi diri, pemikiran serta sikap-sikap socio-politicnya.

Namun jika disimak dengan seksama, sesungguhnya KH Idham Chalid yang berlatarbelakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa.

Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955-1984), itu berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan Ormas radikal.<sup>5</sup>

Pada tahun 1945 Idham kembali ke Kalimantan Selatan dan tak berapa lama kemudian diminta menjadi Kepala di sekolahnya dulu, Madrasatur Rasyidiyyah. Sekolah tersebut mengalami kekosongan pimpinan dalam rentang waktu hampir satu tahun, sejak 1944, terkait dengan semakin ketatnya pengawasan dari pihak Jepang.

Minatnya yang tinggi di bidang keorganisasian membuatnya mudah berkecimpung di dunia pergerakan. Pada tahun 1945 Idham menjadi anggota Persatuan

---

<sup>5</sup> Ahamad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, Penerbit: Pustaka, Pesantren, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Juni 2007)

Rakyat Indonesia (PRI) yang bertempat di Banjarmasin.<sup>6</sup> PRI adalah partai politik pertama yang didirikan di Kalimantan atas anjuran pemerintah Jepang.

Setahun kemudian Idham bergabung di Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) dan duduk sebagai Anggota Pengurus Besar dan Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara dan Selatan. Sermi juga merupakan organisasi politik dari kalangan masyarakat muslim setempat dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai cita-cita proklamasi. Pada tahun 1947 Idham bergabung dengan Sentraal Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), sebuah organisasi bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pemimpinnya adalah seorang yang pernah berguru padanya, Brigjen Hassan Basry.<sup>7</sup> Hassan Basry sebelumnya adalah pemimpin Lasykar Saifullah. Organisasi ini kemudian dilebur menjadi ALRI DIVISI IV.<sup>8</sup> Di sini Idham menjadi Penasehat Staf Umum.

Keterlibatannya di SOPIK menyebabkan dia ditangkap dan ditahan tentara NICA pada 27 Maret 1949 dengan tuduhan menjadi penasehat, pelatih, dan mendalangi gerilya. Setelah dibebaskan, ia kemudian menjadi anggota Parlemen Sementara Negara Kesatuan sampai tahun 1955 mewakili Kalimantan.

---

<sup>6</sup> Arief Mudatsir Mandan, Napak Tilas, h. 141

<sup>7</sup> Ahmad Muhajir, Idham Chalid, h. 35.

<sup>8</sup> Arief Mudatsir Mandan, Napak Tilas, h. 166.

KH. Idham Chalid adalah seorang putra Kalimantan Selatan yang menjadi tokoh Banua luar biasa pada bidang politik. Sebagai salah seorang tokoh besar yang memiliki andil dalam perpolitikan Indonesia, sosok KH. Idham Chalid dikenal sebagai seorang politisi yang cerdas dan mampu mengarungi berbagai zaman. Baginya, berpolitik semestinya berorientasi kepada kemaslahatan, dan berguna bagi orang banyak, dan karenanya tidak mesti ngotot-ngototan atau kaku dalam bersikap. Sikapnya ini dipengaruhi oleh KH. A Wahab Hasbullah, Rais Aam yang sempat berduet dengannya. Ia menggambarkan, seorang politisi yang baik mestilah memahami “filosofi air”. Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia.<sup>9</sup>

## **B. Pemikiran Politik KH. Idham Chalid**

Membahas tentang pemikiran politik KH. Idham Chalid tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sepak terjang dan pergaulan serta pengalaman politiknya. Ada beberapa

---

<sup>9</sup> Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2007),h. 55

pengalaman KH. Idham Chalid dalam jabatan-jabatan politik. KH. Idham Chalid pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada era pemerintahan Soekarno, Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial pada era pemerintahan Soeharto dan mantan Ketua DPR/MPR. Idham juga pernah menjadi Ketua Partai Masyumi, Pendiri/ Ketua Partai Nahdlatul Ulama dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peranan inilah yang membuatnya dikenal sebagai politisi tangguh.<sup>10</sup>

Kecemerlangan karier organisasinya membuatnya dilirik partai Masyumi. Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara (DPRS) 1950 mewakili Masyumi.<sup>11</sup> Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, Idham memilih terlibat di NU dan aktif dalam melakukan konsolidasi ke dalam, antara lain dengan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU yang pada garis besarnya bertugas mengikuti perkembangan politik di tanah air, membuat analisa dan menyimpulkannya untuk diserahkan kepada PBNU, sebagai suatu saran atau usul. Majelis ini dibentuk pada 2-3 September 1951.<sup>12</sup>

Pada awal 1950-an Idham sering menemani Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam PBNU yang sangat besar pengaruhnya dalam berpisahnya NU dari Masyumi, mengikuti

---

<sup>10</sup> Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid; Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), ix.

<sup>11</sup> Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, relasi-relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), 231

<sup>12</sup> Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 397.

“safari” rutin ke cabang-cabang NU.<sup>13</sup> Kedekatan dengan Wahab inilah yang antara lain membuatnya bertahan lama sebagai Ketua Umum.

Idham Chalid memulai kariernya di Jakarta dengan aktif di gerakan Pemuda Ansor,<sup>14</sup> kemudian sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi yang berafiliasi kepada NU dengan konsentrasi pada penanganan masalah pendidikan, pada tahun 1952.<sup>15</sup> Pada tahun yang sama ia diangkat PBNU menjadi Sekretaris Jendral partai dan dua tahun kemudian, terpilih sebagai Wakil Ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955 ia memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu).<sup>16</sup>

Pemilu 1955 adalah ujian pertama bagi NU yang pada tahun 1952 keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Dengan demikian Ketua Lapunu memiliki tugas penting bagi partai di kancah politik selanjutnya. Dan terpilihnya Idham

---

<sup>13</sup> Greg Fealy, “Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU” dalam Greg Fealy dan Greg Barto (Ed), Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (Yogyakarta: LKiS, 1997), 26

<sup>14</sup> Tim Penulis Tempo, Apa dan Siapa, 99.

<sup>15</sup> Bibit Suprpto, Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat hidup, Karya, dan Sejarah perjuangan 157 Ulama Nusantara ,(Jakarta: Gelagar Media Indonesia), 400.

<sup>16</sup> Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), sebuah dewan khusus yang menangani pemilu bagi partai NU yang dibentuk bulai Mei 1953. Lapunu bertanggung jawab menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan (Screening) daftar para calon, pengumpulan dana, hubungan dengan pejabat yang berwenang, dan mengumpulkan hasil pemungutan suara. Struktur Lapunu menyerupai NU, dengan dewan pengurus dari tingkat nasional hingga cabangcabang NU di daerah. Mohammad Subhan, Antologi NU I, 74-75. Sebelum dijabat Idham tahun 1954, posisi ketua ditempati oleh Saleh Surjaningprojdo. Lihat, Greg Fealy, Ijtihad, 186-187 dan 230.

menjadi anggota DPR pada Pemilu 1955 dengan tiket NU adalah konsekuensi logis belaka.

Dalam pemilu yang pertama kali diselenggarakan ini NU meraih keberhasilan yang mengejutkan, bahkan bagi pihak NU sendiri. Dari hanya delapan kursi Parlemen yang dimiliki, NU berhasil mencapai prestasi sebagai tiga besar, dengan 45 kursi, Kemudian presiden waktu itu mengangkat 2 orang anggota DPR dari NU, sehingga mendapat tambahan 2 kursi sehingga menjadi 47 kursi.<sup>17</sup> Total suara yang dikumpulkan NU pada Pemilu 1955 sebesar 6.955.141 (18,4 %) dari total suara pemilih sebesar 37.785.299. Dari perolehan suara yang besar ini, nampaknya ada tiga pilar utama yang menyangga kekuatan NU yaitu ulama, pesantren, dan politisi memegang peranan penting dalam keberhasilan NU menjalani pemilihan umum itu. Ali Haidar menambahkan bahwa faktor utama keberhasilan NU pada Pemilu ini adalah tema dan metode kampanye yang digunakan NU terbukti sangat efektif.<sup>18</sup>

Dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen, pengaruh NU menjadi semakin besar dalam pembentukan Kabinet. Pada 1956 lima Menteri menjadi jatah NU dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II, termasuk Wakil Perdana Menteri yang diserahkan pada Idham Chalid. Fealy menilai naiknya Idham Chalid ke jabatan Wakil Perdana Menteri merupakan hal yang luar biasa. Dengan usianya yang baru 35 tahun dan tanpa pengalaman sebagai menteri, pengangkatannya mencerminkan bahwa NU tidak hanya

---

<sup>17</sup> Arief Mudatsir Mandan., *Op., Cit*, h. 282-283

<sup>18</sup> Lebih lanjut tentang tema dan metode kampanye NU lih. Ali Haidar, *Ibid.*, 170-174 ; Greg Fealy, *Ijtihad*, 187-192 ; juga Saifuddin Zuhri, *Berangkat*, 432-433.

menaruh harapan besar terhadap perkembangan karir Idham, tetapi juga tidak mempunyai calon lain yang layak.<sup>19</sup>

Karir politik Idham semakin meningkat tatkala ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Mukktamar NU ke-21 yang diselenggarakan di Ibukota Sumatera Utara, Medan, di bulan Desember tahun 1956. Ia dengan telak mengungguli Mohammad Dachlan yang telah memegang jabatan tersebut sejak April 1953.

Pesatnya perkembangan karirnya sangat mengagumkan mengingat bahwa, berbeda dengan para pengurus PBNU lainnya, ia bukan orang Jawa dan merupakan lulusan Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, lembaga yang tidak punya kaitan dengan NU dan oleh banyak ulama banyak dipandang sebagai tulang punggung modernisme Islam. Jabatan ini terus dipertahankannya hingga diminta mundur pada tahun 1982 oleh para kiai.<sup>24</sup> Secara keseluruhan, Idham Chalid memimpin NU selama delapan periode dalam waktu hampir tiga dekade. Jaringan eskternalnya yang luas di pusat pemerintahan membuatnya masuk dalam struktur kenegaraan. Tepat sebulan sesudah Soekarno mengumumkan Dekrit, pada bulan Agustus, Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada saat itu nampak lebih berpengaruh dari pada parlemen. Oleh van Bruinessen pengangkatan Idham menjadi anggota DPAS ini adalah karena kedekatannya dengan Soekarno, sebagaimana mayoritas tokoh-tokoh NU lainnya.

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Greg Fealy, *Ijtihad*, 225.

Idham bahkan menjadi pembela blak-blakan dari manifesto ideologis nasionalistik populis Soekarno, Manipol Usdek. Selanjutnya di tahun 1960, Idham menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,<sup>26</sup> yang antara lain tugasnya membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Posisi Wakil Perdana Menteri Kedua kembali dijabat Idham pada tahun 1966 dalam jajaran Kabinet Dwikora hasil reshuffle, walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendekhanya empat bulan. Jabatan ini pula yang terakhir didudukinya di masa Orde Lama.<sup>20</sup>

Meskipun Orde Lama sudah runtuh, karier politik Idham tetap bertahan di puncak. Dia tetap dianggap penting oleh pemerintah Orde Baru hingga dua kali menjabat dalam Kabinet. Pada kabinet Orde Baru yang pertama Idham diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu 1967 hingga 1970.

Kemudian dia menduduki posisi Menteri Sosial di tahun 1970 sampai 1971.<sup>21</sup> Pemilu pertama di masa Orde Baru dilangsungkan pada tahun 1971. Pemilu ini merupakan yang kedua sekaligus yang terakhir bagi partai Nahdlatul Ulama karena Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai yang lebih ekstrim dari yang dilakukan Soekarno. Kebijakan tersebut ditempuh melalui fusi atau penggabungan beberapa partai yang memiliki kedekatan atau kesamaan ideologi. Hal ini dilakukan oleh Orde Baru sebagai bagian dari programnya menata kehidupan berpolitik.

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Greg Fealy, "Lampiran 1: Menteri NU, 1957-1967" dalam *Ijtihad.*, 375.

<sup>21</sup> Martin van Bruinessen, NU, 291.

Demikianlah, NU akhirnya bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan di tahun 1973.<sup>22</sup>

Idham dipilih menjadi Ketua DPR dan MPR sesudah Pemilu 1971 dalam masa bhakti 1971-1977. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Ketua DPA. Jabatan ini tidak lagi punya pengaruh besar dalam kehidupan bernegara, dan sering dianggap posisi kehormatan bagi para pejabat tinggi atau tokoh politik sebelum dipensiunkan.

Tatkala Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin, sikap partai Islam dan umat Islam terpecah. Sebagian mendukung, sebagian lagi menolak, karena cenderung mengarah pada sistem otoritarianisme. Sikap umat Islam memang serba sulit, sebagai salah satu unsur NASAKOM, jika terlibat langsung dalam mekanisme Demokrasi Terpimpin bukan tidak mungkin jika Soekarno akan terus menghegemoni kekuatan umat Islam. Namun, jika tidak bergabung, partai Islam, khususnya NU, khawatir dengan menguatnya pengaruh PKI terhadap Soekarno. Setelah Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1945.

Kabinet Djuanda merupakan kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Kabinet baru di bawah payung UUD 1945 ini diberi nama Kabinet Kerja yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin dan dengan Demokrasi Terpimpin inilah yang melambungkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 101.

Soekarno di kancah politik dengan tidak menjadi suatu simbol Negara lagi. Di saat itulah umat Islam berbeda pandangan dan terpecah-belah menghadapi sistem yang diciptakan Soekarno<sup>23</sup>

Sikap Masyumi yang menentang Demokrasi Terpimpin, sementara NU, PSII dan Perti bergabung di dalamnya semakin terbatasnya ruang gerak untuk partai kaum modernis ini, apalagi budaya politik yang dikembangkan di Indonesia pada waktu itu adalah budaya politik Otoriter dengan Soekarno, PKI dan pemimpin tertinggi Angkatan Darat sebagai pemain utamanya.

Pada 11 Juli 1957 Soekarno membentuk Dewan Nasional yang menganggap DPR semakin melemah yang kemudian terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pada 22 Juli 1959 di bawah UUD 1945 yang juga diketuai Soekarno, berakhir tugas Dewan Nasional. Di sini, Idham menjadi anggotanya. Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada saat itu tampak lebih berpengaruh daripada parlemen. Idham, menurut Martin Van Bruinessen, diangkat menjadi anggota DPAS karena kedekatannya dengan Soekarno, sebagaimana

---

<sup>23</sup>Sosok Idham memang lebih kalem, tetapi sama dahsyatnya dengan Soekarno. Bukannya membangkitkan semangat, tetapi tahu menghadapi emosi massa dan mendatangkan simpati. Ia orang yang diplomatis. Selalu terlihat tenang, dan seringkali membuat orang yang marah menjadi tak berketik. Fealy mencatat bahwa kepribadian dan gaya kepemimpinan Idham sebagai seseorang yang ahli dalam berkomunikasi, punya banyak lelucon dan sangat pandai membaca suasana hati pendengarnya. Kemampuannya menyenangkan hati dan menggerakkan massa membuatnya menjadi salah satu pembicara NU yang paling populer. Pidato-pidatonya merupakan perpaduan dari khutbah keagamaan, dongeng, propaganda politik selalu disampaikan dengan cara yang menyejukkan dan penuh kerendahan hati. Kalau mau dianalogkan dengan jurus pesilat: Soekarno menyerang dengan jurus yang keras dan gesit, Idham menyambut serangan dengan jurus lembut tetapi mematikan. Sikap pemimpin NU seperti Idham inilah yang menurut Greg Fealy cocok menghadapi agresifitas Soekarno. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad*, 231.

tokoh-tokoh NU lainnya, Idham bahkan menjadi pembela manifesto ideologis Soekarno, MANIPOL USDEK.<sup>24</sup>

Sebagai Ketua Umum PBNU, posisi Idham sangat sentral dalam kondisi politik saat itu. Kemampuannya membawa NU menyesuaikan diri dalam iklim Demokrasi Terpimpin, sebagian di antaranya merupakan pengaruh dari sikap dan pandangannya yang luas tentang iklim politik. Dalam sebuah kesempatan tahun 1959, ia mengemukakan pandangannya tentang falsafah politik yang luwes ala Sunni. “Dari sudut pandang politik dalam negeri, Nahdlatul Ulama selalu sedapat mungkin, untuk menyesuaikan diri dengan waktu dan peristiwa yang sedang terjadi dan tidak pernah mengajukan sesuatu yang bersifat absolute dan tanpa syarat.”<sup>25</sup>

Dalam kondisi ini, AH. Nasution, perwira AD, mendatangi Idham untuk mengetahui pandangan NU atas Dekrit Presiden. Idham menjawab, “Kami (NU) tidak dapat berkomentar. Itu adalah hak presiden untuk menentukan cara mengamankan Negara.”<sup>26</sup>

Sikap PBNU mendukung Demokrasi Terpimpin semakin mengemuka tatkala Muktamar NU ke-22 yang berlangsung pada bulan Desember 1959 di Jakarta, yang menghasilkan duet KH. A. Wahab Chasbullah dan Idham Chalid sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Para ulama tampak mudah menyesuaikan diri dengan Demokrasi

---

<sup>24</sup> Martin van Bruinessen, NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 75.

<sup>25</sup> Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, (Yogyakarta: 2009), 73

<sup>26</sup> KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 452.

Terpimpin. Hal ini, misalnya tercermin dari pernyataan Kiai Wahab: “Demokrasi memang harus dipimpin, yakni dipimpin oleh norma dan moral. Tanpa kepemimpinan itu akan menjurus pada anarki, baik anarki maupun diktator bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.”<sup>27</sup>

Idham, sebagai ketua Tanfidziyah, menurut Andree, juga tak memiliki keberatan yang mendasar terhadap Demokrasi Terpimpin. Lebih lanjut Idham mengajukan penjelasan mengenai pandangan Islam tentang demokrasi. Menurutnya, dalam Islam, suara mayoritas sebagaimana disertai “haq” kebenaran dan “ahli”nya.

Sebelumnya, PBNU menilai bahwa tujuan partai hanya bisa tercapai melalui kehadiran NU dalam kabinet dan Dewan Nasional, namun mereka sama sekali tidak bermaksud meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, serta tetap menjaga solidaritas Islam dan menentang Komunisme. Hanya dengan ikut terlibat dalam Kabinet Karya dan Dewan Konstituante, NU akan bisa membatasi perombakan kabinet parlementer dan membendung pengaruh PKI. Dengan absennya Masyumi dan PSII, paling tidak masih ada satu partai besar dalam Demokrasi Terpimpin.<sup>46</sup> PBNU menanggapi kecaman yang menuduh mereka tidak konsisten dengan mengatakan, “seandainya tetap memakai kata penghibur “konsekuen” maka perlahan-lahan kami pasti sudah tertinggal jauh di belakang lawan politik dan ideologis kami.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andree Feillard dalam NU Vis A vis Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2008), h, 82

<sup>28</sup> Idham Chalid, Buku kenang-Kenangan Muktamar NU ke XXII, 79. Sebagaimana dikutip oleh Greg

Fealy, Ijtihad Politik Ulama..., 241.

Sebagai ganti DPR pilihan rakyat yang dibubarkan, pada Maret 1960 Soekarno membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang merupakan mekanisme pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Anggota-anggota yang duduk dalam dewan tersebut adalah mereka yang disukai Soekarno dan bertugas menjalankan politiknya. Demi mewujudkan ambisinya, Soekarno memanggil Idham dari NU, Suwirjo dari PNI, DN. Aidit dari PKI, dan Ruslan Abdulgani (Wakil Ketua DPA) ke Istana presiden di Tampaksiring Bali untuk menentukan struktur DPR-GR.

Mereka menyetujui susunan DPR-GR yang beranggotakan 261 orang, 130 dari partai politik, 95 dari golongan fungsional dan 36 wakil militer. Dari jumlah tersebut, NU memiliki 35 kursi di perwakilan partai politik, dan 15 kursi dari perwakilan golongan fungsional. Begitu kembali dari Tampaksiring, Idham langsung mendapatkan kecaman keras atas keputusannya menyetujui susunan kabinet baru yang dianggap telah mengorbankan kepentingan politik Islam yang lebih luas. Para ulama NU menganggap bahwa DPR-GR adalah DPR ghosob alias merebut hak atau kepemilikan orang lain. Kiai-kiai NU seperti KH. Bisri Syansuri, KH. Achmad Siddiq, KH. Muhammad Dachlan, dan KH. Machrus Ali adalah mereka yang menentang langkah NU bergabung di DPR-GR ini.<sup>29</sup> Sedangkan KH. A. Wahab Chasbullah mendukung penuh langkah NU bergabung dalam DPR-GR ini. Prinsip Kiai Wahab tegas, lebih baik melakukan perbaikan dari dalam, dengan melibatkan NU dalam konsep trisula itu. Begitu pula tatkala terjadi perbedaan pandangan mengenai sikap NU terhadap DPR-Gotong Royong

---

<sup>29</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 165. Lihat juga dalam KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, 483-484.

(DPR-GR). Bahkan ia berbeda pendapat dengan iparnya, KH. Bisri Syansuri. "Masuk dulu, kalau tidak cocok baru keluar, kalau di luar saja, kembali masuk akan sulit. Kalau sudah masuk, mudah keluarnya," demikian alasan pengasuh Pesantren Tambakberas ini.<sup>30</sup>

Sikap demikian menyebabkan Kiai Wahab dikecam habis-habisan. Kiai Wahab menganggap NU harus masuk ke dalamnya. Karena dia berpandangan, bagaimana nasib umat Islam kalau perundang-undangan yang ada akan dibuat oleh "orang lain". Sebaliknya Kiai Bisri menganggap, seharusnya DPR adalah hasil dari Pemilu 1955, sedangkan DPR-GR dibentuk Presiden Soekarno. Karena itu, dalam pandangannya, DPR-GR tidak sah dan tidak ada. Padahal Kiai Wahab, sebagai orang pertama NU (Rais Aam), bersedia menerima DPR-GR.<sup>50</sup>

Bahkan, dalam Siaran ke VII PBNU yang ditandatangani Ketua Umum Idham Chalid dan Sekjen PBNU Saifuddin Zuhri, tegas dinyatakan bahwa kebijakan PBNU memberi kesempatan kepada anggota-anggota NU yang ditunjuk kepala Negara duduk dalam Kabinet karya dan dewan Nasional, lebih didasarkan pada mencegah datangnya madaarat yang lebih besar daripada mencari kebalikan sebagaimana kaidah Fiqh yang berbunyi *Dar ul Mafasid Muqaddam ala jalb al-Masalih*.

Apa yang dimaksud madharat lebih besar itu juga dinyatakan secara eksplisit, yaitu:

---

<sup>30</sup> Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan, (Yogyakarta: Arruz, 2010), 149.

Pertama tempat yang disediakan bagi warga NU dapat diduduki oleh anasir lain yang lebih membahayakan.

Kedua, kedudukan Partai NU sebagai oposisi belum disiapkan , akan bisa merupakan musibah (bencana) yang tidak kita harapkan.<sup>31</sup>

Adapun dalam konsepsi demokrasi, sangat menarik mencermati pandangan Idham tentang demokrasi dalam Islam. Ia berkesimpulan bahwa demokrasi dalam Islam sangat berbeda dengan demokrasi liberal Barat (menunjuk pada sistem Parleментар).

Dengan demikian apa yang hendak dikatakan oleh Idham sesungguhnya adalah bahwa jika yang dikritisi oleh Demokrasi Terpimpin dari sistem liberal adalah pentingnya suara mayoritas, maka Islam melakukan hal yang sama. Islam tidak pernah mengajarkan mengambil keputusan semata-mata karena banyaknya dukungan. Begitu pula, jika yang diandaikan oleh Demokrasi Terpimpin adalah suasana yang menghargai pendapat minoritas, musyawarah mufakat yang menghasilkan keharmonisan tanpa mengadu perlu suara, bukannya perpecahan sebagaimana yang menjadi efek samping sistem liberal, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama.

Apa yang dikemukakan Idham di atas juga hampir sama dengan pendapat KH. Masjkur: “Misalnya lagi, dalam menyetujui ‘Demokrasi Terpimpin’, pada umumnya haruslah ditekankan pada perkataan ‘Demokrasi’-nya, oleh karena menjadi anutan di kalangan Nahdlatul Ulama berdasarkan keyakinan Islam yang menjadi dasar pokok utama dari partai, bahwa suatu demokrasi yang tidak terpimpin akan bisa menimbulkan

---

<sup>31</sup>Arief Mudatsir Mandan (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), 362-363.

anarkisme, sebaliknya sesuatu yang dipimpin tanpa demokrasi mengantarkan pada diktatorisme. Baik anarkisme maupun diktatorisme ditolak secara prinsipil.<sup>32</sup>

Akhirnya, Demokrasi Terpimpin bisa sesuai dengan Islam apabila ada dua unsur yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling mengawasi. Kedua unsur tersebut adalah: unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah, atau dengan kata lain “sang pemimpin yang menghargai hikmat kebijaksanaan musyawarah dan ahli musyawarah yang menyadari dan menghargai kepemimpinan seorang pemimpin.”

Meski setuju dengan Demokrasi terpimpin, namun Idham berusaha membaca konsep yang ditawarkan oleh Soekarno tersebut. Sebab Demokrasi Terpimpin berpotensi menjadi sumbu kepemimpinan diktatorial. Bagi Idham, seorang pemimpin tak boleh hanya mengandalkan kekuasaannya. Ia mesti mendengar dan sungguh-sungguh menghargai pendapat orang. Demokrasi Terpimpin dalam Islam menurut Idham “bukanlah terpimpin oleh kemauan seseorang, bukan oleh nafsu berkuasa manusia, dan bukan oleh semboyan-semboyan kosong, tetapi terpimpin oleh ahlinya.”

Pandangan-pandangan Idham di atas, merupakan pandangan penting pada saat itu, sebab sebagai Ketua Umum PBNU, ia memiliki andil besar dalam memimpin dan mengarahkan laju organisasinya. Pandangan-pandangan pribadinya secara tak langsung berpengaruh pada laju partainya, dan merupakan gambaran sekilas dinamika pemikiran politik NU. Tak heran jika di masa Demokrasi Terpimpin ini posisi NU terlihat stabil.

---

<sup>32</sup>Soebagijo I.N, KH.Masjkur: Sebuah Biografi, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 201.

Sebab, Idham membawa NU mengatasi rintangan-rintangan politik. Terjadilah kerjasama yang harmonis antara NU dengan pemerintah, saling menutup kekurangan, saling membantu. Begitu mesranya hubungan antara NU dengan pemerintah, sehingga sebagian internal NU menganggap organisasi NU sering menerjang *vivere pericoloso* (istilah yang cukup populer saat itu yang berarti menyerempet bahaya), terhadap hukum syara.

Hal ini misalnya, dapat dilihat dalam peristiwa berikut ini. Pada akhir 1960, unsur-unsur pokok demokrasi terpimpin sudah jalan. DPR-GR yang beranggotakan kelompok fungsional, militer serta wakil-wakil partai yang sudah disetujui pemerintah telah bertugas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Demikian juga dengan MPRS yang mulai bertugas sejak November 1960.<sup>33</sup> Front Nasional yang bertujuan mengerahkan massa juga sudah terbentuk pada bulan Agustus dan beranggotakan partai politik, militer, dan para pemimpin kelompok fungsional.

Dalam bulan yang sama Soekarno melarang partai Masyumi dan PSI, serta menyederhanakan sisten kepartaian dengan mengakui hanya 10 partai politik. Dengan menerima proses restrukturisasi ini, NU bisa mengamankan posisinya dalam rezim yang baru. NU memiliki wakil di semua lembaga Demokrasi terpimpin bahkan kini menjadi partai Islam terbesar. NU juga menjadi komponen utama dari organisasi keagamaan yang tergabung dalam Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Meskipun secara independensi dan wibawa NU sedikit berkurang, akan tetapi sikap ini menggambarkan

---

<sup>33</sup> MPRS beranggotakan seluruh anggota DPR-GR ditambah wakil sipil dan militer yang ditunjuk Lembaga ini bertugas memilih presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

watak akomodatif NU. Selama Soekarno masih memberikan kesempatan bagi NU untuk memegang kendali Departemen Agama dan menghindari tindakan yang mengganggu pelaksanaan ibadah umat Islam, maka NU tetap mau bekerjasama dengan pemerintah. Perhatian PBNU adalah soal bagaimana menyesuaikan dengan keadaan darurat politik, bukan mengubahnya. Hal ini tercermin dalam pidato Idham dalam Mukhtamar Partai 1962:

Pada bulan-bulan pertama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin terlihat proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang terhadap demokrasi gaya baru ini. Siapa yang mendukung dibiarkan hidup, sedangkan yang menentang harus disingkirkan. Ini secara makro. Secara mikro, di kalangan umat Islam, proses kristalisasi juga menjadi kenyataan. Pihak yang ikut dalam sistem ciptaan Soekarno dapat turut serta dalam jaringan kekuasaan atau sebagai peserta pinggiran. Sedangkan pihak yang melawan, bukan saja disingkirkan dari lembaga-lembaga politik formal, tapi juga partai mereka dibubarkan seperti Masyumi dan PSI dan tokoh-tokoh mereka dipenjarakan bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas.

Dengan terbentuknya DPRGR pada April 1960, proses kristalisasi politik di kalangan umat mendapatkan momentum yang kritis dan menentukan, dan proses itu mencapai titik puncak pada akhir 1960 sewaktu Masyumi bubar. Kolaborasi antara Soekarno dan partai-partai Islam, yang berlangsung terus sampai jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Pada periode sulit ini partai-partai Islam dapat dikatakan sedang berada di bawah pengaruh kuat NU. Strategi politik NU yang menggunakan Doktrin Pesantren dan Implementasinya dalam Politik Praktis pada periode Demokrasi

Terpimpin. KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh yang berperan dominan dalam perjuangan NU pada waktu diadakannya musyawarah wilayah tentang masuk tidaknya NU ke dalam DPRGR, strateginyalah yang mendapat dukungan besar. Dalam buku Anggaran Dasar NU dikatakan bahwa memuliakan yang tinggi dan mengasihi yang rendah yang merupakan bagian dari tugas Syuriah dalam rangka menguatkan tali persaudaraan di kalangan para Ulama NU. Doktrin ini dengan sendirinya telah memperkuat posisi para sesepuh ulama (Kiai Wahab dan Idham) yang loyal kepada Presiden Soekarno. Idham berpandangan bahwa dalam menghadapi Demokrasi terpimpin, Umat Islam dihadapkan pada dua macam ijtihad politik yang berbeda. Ijtihad pertama berkesimpulan bahwa umat Islam lebih baik masuk ke dalam sistem demi kepentingan Islam, sedangkan Ijtihad kedua berpendapat bahwa demi kepentingan Islam maka umat Islam harus melawan sistem.

Ijtihad pertama berasal dari pemikiran pihak pesantren dan ijtihad kedua pemikiran dari pihak modernis. Keduanya sama-sama berdasarkan keyakinan agama.

Dalam analisis Greg Fealy, ada beberapa catatan penting yang pantas diperhatikan saat para kiai NU bergabung dalam Demokrasi Terpimpin ini. “Ya tapi, pada umumnya semua kyai tidak suka demokrasi terpimpin dan NASAKOM. Meskipun Idham Chalid menulis beberapa buku tentang Nasakom, tapi saya kira dia seperti merasa terpaksa pada waktu itu karena situasi politik. Kalau secara nyata tidak mendukung demokrasi terpimpin itu membahayakan NU, dan juga membahayakan karir politik Idham. Menurut mereka, kalau NU tidak meniru retorika Soekarno, posisi NU terancam

dan disudutkan. Jika NU disudutkan akan terancam bahwa tidak ada ormas Islam besar lagi yang masuk sistim politik.

Hanya dengan NU umat Islam bisa terwakili. Dan misalnya dengan kasus HMI, ketika organisasi ini diancam dilarang oleh PKI, NU yang membela. Dan akhirnya HMI selamat. NU sangat bangga, karena ini adalah sebuah bukti bahwa lebih efektif terlibat dalam sistim politik daripada tidak sama sekali. Karena itu, keterlibatan dalam demokrasi bagi pandangan politik NU adalah mendukung pula keberadaan kaum nasionalis, komunis dan sebagainya. Tapi preferensi mereka adalah ingin membubarkan PKI. Ini berbeda dengan kelompok militan yang bagi NU sangat merusak kehidupan politik Indonesia, kalau PKI terlibat dalam pemerintahan. Yusuf Hasyim, Machrus Ali dan Syubhan menganggap bahwa harus lebih siap dalam menghadapi kekuatan PKI. Dalam hal ini, mereka lebih siap dalam menghadapi PKI, tetapi mereka juga ingin menggunakan lembaga-lembaga demokrasi untuk kepentingan NU.

Kalau warga PKI masuk dalam satu lembaga atau institusi maka otomatis orang NU juga akan masuk, biasanya yang masuk orang militan, bukan orang yang akomodatif.<sup>34</sup> Idham juga menekankan bahwa bagi NU dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, demokrasi harus mendapatkan penekanan, karena menurut kepercayaan Islam Demokrasi tanpa pimpinan akan menjurus kepada anarki dan kepemimpinan tanpa demokrasi akan menjurus pada diktator. Dalam pandangan Idham pemerintahan Bung Karno yang sentralistik dan tidak memberi peluang adanya perbedaan pendapat masih

---

<sup>34</sup> Pertengkar Elit Politik Nahdlatul Ulama (1960-Hingga Kini): Sebuah Wawancara dengan Greg Fealy..http.

dalam kategori Demokrasi. Itulah sebabnya NU di bawah kepemimpinannya tetap berada dalam Demokrasi Terpimpin sampai sistem ini berakhir. Menurut Greg Fealy, Keterlibatan dalam demokrasi bagi pandangan politik NU adalah mendukung pula keberadaan kaum nasionalis, komunis, dan sebagainya. Tapi preferensi mereka adalah ingin membubarkan PKI.

Selain itu dengan bergabung pada situasi yang serba sulit ini, NU bisa memainkan politiknya secara halus, dalam hal ini mengincar kursi Menteri Agama. Kedudukan sebagai menteri agama memang telah menjadi incaran NU. Pada Departemen inilah orang-orang NU seperti di rumah sendiri. Departemen Agama dipandang sebagai jalur politik NU yang efektif, lewat jalur ini NU bisa berkomunikasi dengan massa besarnya sekaligus meluaskan pengaruh ke seluruh Indonesia dan Idham sebagai wakil ketua MPRS kemudian hampir semua lembaga pemerintahan orang-orang NU. Dan ketika masalah ekonomi pada periode Demokrasi Terpimpin hampir-hampir tidak pernah dipikirkan secara serius oleh pemerintah sehingga inflasi pada tahun 1965 mencapai 65% karena sibuk mengurus revolusi, konfrontasi dengan Malaysia dan usaha pengembalian Irian Barat, sistem Demokrasi Terpimpin mungkin masih bisa bertahan beberapa waktu lagi jika peristiwa Gerakan 30 September 1965 / G 30 S/PKI tidak meledak. Kegagalan gerakan ini membawa Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya beserta PKI kepada kehancuran politik secara total.

Mantan Ketua PBNU dan Ketua MPR/DPR KH.Dr.Idham Chalid (88) meninggal dunia di kediamannya di kawasan pendidikan Darrul Maarif, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu pagi, pukul 08.00, karena sakit yang diderita selama 10 tahun terakhir.

Saiful Hadi, putera mantan Wakil Perdana Menteri II pada era Soekarno itu, mengatakan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di Cipete dan akan dimakamkan Senin (12/7) di Pondok Pesantren Darul Quran, milik keluarga, di Cisarua, Jawa Barat.<sup>35</sup>

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Politik KH. Idham Khalid**

Pemikiran politik KH. Idham Chalid tentu saja ada yang mempengaruhinya. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi ide-ide dan pikiran politik beliau diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan**

Pendidikan KH. Idham Chalid dilalui melalui pendidikan keagamaan, alumnus Pondok pesantren Gontor ini tentu saja mempengaruhi pemikiran politik KH. Idham Chalid, karena nuansa agama menjadi dasar berpijak dalam mengambil keputusan politik beliau.

Beliau memulai pendidikan dasarnya pada tahun 1933, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikannya di Madrasah al Rasyidiyyah (dulunya bernama Arabisch School), sebuah lembaga pendidikan agama Islam. Didirikan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid ayah beliau pada tahun 1922. Beliau merupakan lulusan universitas Al-Azhar yang saat itu terkenal sebagai pusat studi agama Islam. Lembaga ini awalnya

---

<sup>35</sup> Jakarta (ANTARA News)

hanya pengajian yang dilangsungkan di rumah dengan sistim halaqah (para santri duduk di sekeliling guru sambil mengikuti pelajaran). Beliau peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, Kairo Mesir.

## 2. Pengalaman Jabatan

Pengalaman jabatan yang pernah disandang KH. Idham Chalid juga mempengaruhi pemikiran politiknya. Dia seorang tokoh Indonesia yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas. Beliau pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama. Juga pernah memimpin pada tiga parpol berbeda yaitu Masyumi, NU dan PPP.

Sikapnya ini dipangaruhi oleh KH. A Wahab Hasbullah, Rais Aam yang sempat berduet dengannya. Ia menggambarkan, seorang politisi yang baik mestilah memahami “filosofi air”. Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia.<sup>36</sup>

## 3. Keluarga

---

<sup>36</sup> Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2007),h. 55

Faktor keluarga juga cukup signifikan mempengaruhi pemikiran politik KH. Idham Chalid . Dukungan isteri dan anak-anak beliau dalam berkiprah menjadikan beliau pribadi yang kokoh, santun dan karismatik.

KH. Idham Chalid yang di didik dalam keluarga yang taat beragama, apalagi orang tua beliau adalah tokoh ulama terkemuka di Amuntai

#### 4. Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pertemanan cukup penting dalam mewarnai watak dan pemikiran seseorang. KH. Idham Chalid juga mengakui hal itu. Menurut beliau lingkungan tempat tinggal yang sederhana dan cenderung masuk dalam katagori kaum terdidik dan agamis memberikan motivasi tersendiri bagi beliau untuk menjadi orang terdidik yang pandai.

Sentuhan-sentuhan dari lingkungan pertemanan juga menjadi hal yang penting. Beliau banyak bersentuhan dengan tokoh-tokoh politik nasional bahkan luar negeri yang memberikan pelajaran yang berarti tentang strategi yang mana yang harus diterapkan ketika tiba saatnya untuk digunakan.

Dengan demikian lingkungan dan pergaulan juga sangat signifikan dalam konteks memberi pengalaman dan menambah kaya perbendaharaan pengetahuan dan pemikiran politik.

#### **D. Analisis Data**

Pemikiran politik KH. Idham Chalid merupakan pemikiran yang konseptual dan aktual, hal itu dibuktikan beliau bahwa pemikiran politik beliau bukan hanya berupa teori-teori saja sebagaimana para pengamat politik, tetapi beliau juga telah mengaplikasikan pemikiran politik beliau dalam bentuk yang nyata dimana beliau yang menghantarkan beliau menjadi Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama. Juga pernah memimpin pada tiga parpol berbeda yaitu Masyumi, NU dan PPP.

Pemikiran KH. Idham Chalid dikategorikan sebagai pemikiran politik demokratis yang bernapaskan syura sebagaimana disebutkan bahwa Politik adalah keahlian memerintah dan menjalankan negara; atau politik adalah kekuatan atau kemampuan untuk meraih tujuan; atau politik adalah keahlian untuk mewujudkan sikap mengalah yang timbal balik dan mewujudkan konsensus.<sup>37</sup> Selain itu dalam keterangan lain ia menyebutkan: “Politik adalah seni pemerintahan dan pengendalian negara, atau ia adalah kekuatan (kemampuan) untuk mencapai apa yang diinginkan, atau ia adalah seni pergantian kepemimpinan kompromi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-pilar Kebangkitan Umat; Telaah Ilmiah Terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Al-‘Itishom Ayaha Umat, 2001), h. 151

<sup>38</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Dalam Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, alih bahasa, Wahidahmadi dan Jasiman, (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 187

Corak politik KH. Idham Chalid termasuk gaya seorang politisi demokratis nasionalis dan agamis. Dikatakan demokrat karena beliau menjunjung azas musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Menghargai saran dan pendapat orang lain, walaupun dari kalangan bawah. Hal itu juga sesuai dengan pandangan para ahli antara lain:

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dari sudut organisasi demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>39</sup>

Dikatakan Nasionalisme, karena KH. Idham Chalid tetap berpegang pada sendi-sendi nasionalisme yang diikat dengan kesadaran akan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat sejumlah kelompok, seperti suku bangsa, ras, dan agama setiap kelompok budaya juga memiliki pandangan atau sistem nilai yang dipegang sebagai landasan untuk memajukan kepentingan-kepentingan yang khas. Sistem nilai itu dapat disebut sebagai sub ideologi sehingga dalam masyarakat majemuk terdapat sejumlah sub ideologi. Dalam situasi ini ideologi nasional menjadi konsensus berbagai kelompok dan golongan kepentingan, atau merupakan hasil konsensus berbagai sub ideologi.

---

<sup>39</sup> Ubaidillah, A. et al, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta ; IAIN Press, 2000), h, 162-163

Suatu masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional; sedangkan nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi nasional karena dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Dikatakan agamis, karena beliau tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama dalam berpolitik, yakni nilai-nilai Islami yang beliau anut dan yakini.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Idham Chalid, yaitu faktor pendidikan, pengalaman jabatan, keluarga, dan faktor lingkungan.

Pendidikan KH. Idham Chalid yang berbasis pendidikan keagamaan, alumnus Pondok pesantren Gontor ini tentu saja mempengaruhi pemikiran politik KH. Idham Chalid, karena nuansa agama menjadi dasar berpijak dalam mengambil keputusan politik beliau, sehingga dalam berpolitik beliau selalu membalutnya dengan ajaran agama Islam. Berpolitik tetapi tetap berpijak pada sendi-sendi agama.

Pengalaman jabatan yang pernah disandang KH. Idham Chalid juga mempengaruhi pemikiran politiknya. Dia seorang tokoh Indonesia yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas Islam tentunya kaya akan pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi politik.

Faktor keluarga juga cukup signifikan mempengaruhi pemikiran politik KH. Idham Chalid, keluarga baik isteri dan anak-anak beliau merupakan instrumen yang

penting dalam mewarnai karakter beliau, sehingga mengalir dalam pikiran dan tindak tanduk beliau dalam dunia politik.

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pertemanan cukup penting dalam mewarnai watak dan pemikiran KH. Idham Chalid Sentuhan-sentuhan dari lingkungan pertemanan juga menjadi hal yang penting. Beliau banyak bersentuhan dengan tokoh-tokoh politik nasional, bahkan tokoh-tokoh luar negeri yang memberikan pelajaran yang berarti tentang strategi yang mana yang harus diterapkan ketika tiba saatnya untuk digunakan.

Dengan demikian lingkungan dan pergaulan juga sangat signifikan dalam konteks memberi pengalaman dan menambah kaya perbendaharaan pengetahuan dan pemikiran politik.